

BAB V
HAMBATAN UN WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MESIR PASCA ARAB SPRING
(2017-2021)

Masalah perempuan menjadi prioritas utama, memberikan perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai, mengingat dampak sosial serta fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi seluruh masyarakat. Konstitusi Mesir pun dengan tegas menetapkan kesetaraan gender di segala bidang, mewajibkan negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Namun, dengan kondisi sosial-ekonomi dan politik di Mesir, dalam praktiknya banyak dari hak-hak tersebut telah dilanggar karena, tradisi dan kebiasaan yang salah, ketidakmampuan legislator untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Akibatnya, kebijakan legislatif dan prosedural menjadi tidak efektif dan efisien dalam melindungi perempuan sebagaimana tercermin baik dalam KUHP maupun UUD. Hal itu menjadi batu sandungan yang menghambat tercapainya keadilan sosial, kesetaraan gender, kemajuan, dan pembangunan perempuan.¹¹³

Pemberdayaan perempuan menurut Miwa Kato selaku direktur UN Women Mesir dalam wawancaranya pada tahun 2016 melalui Ahram Online, bukan hanya sekedar masalah perempuan, tetapi juga menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara Mesir.¹¹⁴ Hal itu selaras dengan pernyataan presiden Morsi dalam seminar virtual mengenai upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan di Mesir dilansir dari Daily News Egypt pada 2021, “Perempuan Mesir menikmati kehadiran kepemimpinan politik yang percaya akan pentingnya perannya, mendukung kemampuannya, dan sangat ingin

¹¹³ The National Council for Women. 2015, *The National Strategy for Combating Violence against Women*, Giza, hal. 3.

¹¹⁴ Mariam Mecky, *Female empowerment is not just about women, but is central for progress: Interview*, diakses pada 3 November 2022 <https://english.ahram.org.eg/News/190418.aspx>

memberinya kesempatan. Kesempatan untuk berkontribusi secara efektif dalam proses pembangunan yang disaksikan oleh negara.” Dalam kesempatan yang sama Christine Arab, selaku perwakilan UN Women di Mesir menekankan bahwa pentingnya memberdayakan perempuan untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi di Mesir.¹¹⁵

5.1 Hambatan di Bidang Sosial-Budaya^{116 117}

Hambatan tersebut salah satunya adalah mengubah pola pikir dan sikap mayoritas masyarakat Mesir terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku adalah pendekatan yang sangat diperlukan untuk menyentuh dasar akar penyebab kekerasan dengan cara yang “*never-ending*”. Dalam masyarakat Mesir masih ada kesalahpahaman tentang kesetaraan gender, yang memiliki keterkaitan dengan pentingnya memiliki kesempatan dan hak yang sama bagi pria dan perempuan, pada kesetaraan sosial, hukum, politik, dan ekonomi.

Laki-laki menentang perempuan yang bekerja di luar rumah, dan partisipasi mereka dalam aspek kehidupan politik dan publik. Perempuan terus memikul beban dalam hal pekerjaan rumah tangga, sementara pria membuat sebagian besar keputusan rumah tangga. Pola-pola ini dimulai pada masa kanak-kanak, dengan pria dan perempuan sering mengikuti model yang ditetapkan oleh orang tua mereka.

Laki-laki dan perempuan sama-sama melaporkan tingginya tingkat penggunaan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Hampir setengah dari laki-laki melaporkan pernah menggunakan kekerasan fisik terhadap istri mereka. Lebih dari 70 persen pria dan perempuan mengatakan mereka percaya bahwa istri harus menoleransi kekerasan untuk menjaga keutuhan keluarga. Pelecehan seksual

¹¹⁵ Daily News Egypt, “Combating violence against Egyptian women: Achievements, challenges, and recommendations”, diakses pada 21 Desember 2022 <https://dailynewsegypt.com/author/daily-news-egypt/>

¹¹⁶ Katie Booth, Salma El Hussein. 2014, Egypt: Keeping women out Sexual violence against women in the public sphere, FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Woman Foundation, The Uprising of Women in the Arab world, hal. 4

¹¹⁷ Shereen El Feki, Gary Barker dan Brian Heilman. 2017, *Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) - Middle East and North Africa*, Cairo dan Washington, D.C.: UN Women dan Promundo-US <https://imagesmena.org/en/download/>

di jalanan umumnya dilakukan oleh laki-laki dan sering dialami oleh perempuan perkotaan. Lebih dari 60 persen pria melaporkan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan atau anak perempuan, dan proporsi yang sama dari perempuan melaporkan perhatian yang tidak diinginkan tersebut. Lebih banyak perempuan daripada pria yang menyalahkan korban karena telah dilecehkan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, budaya menjadi salah satu faktor yang mendasari perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan, yaitu berasal dari norma masyarakat tentang hak istimewa laki-laki atau menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah. Perempuan telah menderita karena tatanan patriarki peran laki-laki yang mendominasi budaya sosial, sehingga menyebabkan perbedaan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi setiap aspek aktivitas manusia. Laki-laki berperan sebagai pengendali utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan memiliki pengaruh yang kecil atau bahkan tidak memiliki hak dalam lingkup masyarakat secara umum, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun psikologis, bahkan termasuk lembaga pernikahan. Pembatasan budaya patriarki terhadap peran perempuan membuat perempuan terikat dan terdiskriminasi. Perbedaan yang terjadi menyebabkan terciptanya mitos, stereotip, aturan, dan praktik yang merendahkan perempuan dan memicu kekerasan.

Selama beberapa dekade, bahkan sebelum Revolusi 25 Januari, hak-hak perempuan, dan kesenjangan gender dalam hak asasi manusia dan status sosial telah meningkat di Mesir. Hal tersebut termasuk budaya impunitas di antara pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan, stigmatisasi sosial dan menyalahkan orang yang selamat/korban, dan kurangnya definisi yang luas dan komprehensif tentang pelanggaran yang mempengaruhi perempuan.

Budaya impunitas yang terjadi di Mesir yang menjadikan sebagian besar korban kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan. Para penyintas sering kali dibujuk untuk mengajukan pengaduan karena takut akan stigma sosial, dan kurangnya layanan tanggapan yang tersedia, serta laporan yang dianggap sia-sia sebagai akibat dari administrasi peradilan yang lemah. Sedikit yang dicatat jarang menghasilkan penuntutan yang berhasil, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada saat Arab Spring di Mesir, para penyintas yang

melapor tidak memiliki kelanjutan dalam kasusnya. Impunitas pada gilirannya mengarah pada toleransi kekerasan terhadap perempuan dan kecenderungan untuk menyalahkan penyintas daripada pelaku.

Hubungan antara kekerasan yang meluas dan diskriminasi terhadap perempuan yang diabadikan dalam hukum Mesir tidak dapat diabaikan. Menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dianggap di banyak masyarakat Mesir sebagai hal yang memalukan dan lemah, dengan banyak perempuan masih dianggap bersalah karena menarik kekerasan terhadap diri mereka sendiri melalui perilaku mereka. Ini sebagian menjelaskan tingkat pelaporan dan investigasi yang rendah. Sampai saat ini, undang-undang di beberapa negara masih membedakan antara ruang publik dan swasta, yang membuat perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan lebih cenderung membenarkan pemukulan istri. Secara umum, pendidikan telah ditunjukkan untuk mempromosikan kesetaraan perempuan dan sikap kesetaraan gender. Pendidikan jelas mendorong dukungan untuk kesetaraan. Baik pria maupun perempuan dengan pendidikan tinggi, serta mereka yang ibunya memiliki pendidikan tinggi. Pembagian pekerjaan rumah tangga oleh orang tua juga berkontribusi pada sikap yang lebih adil; laki-laki dan perempuan yang ayahnya berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga juga memiliki sikap yang lebih setara gender.

Pendekatan pengasuhan yang seimbang untuk mengasuh anak menantang ketidaksetaraan gender dengan kritik terhadap Norma sosial, peran dan hubungan yang tidak adil, dengan memasukkan strategi penyeimbangan kembali yang progresif untuk hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, sebagai sarana untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan untuk semua. Program kesetaraan gender dapat membawa perubahan signifikan dalam sikap dan praktik gender pria dan perempuan jika dirancang dengan baik dan jika didasarkan pada teori perubahan gender yang kuat. Program kesetaraan gender yang berhasil mengikuti model teoretis yang tercantum di bawah ini:

Program kesetaraan gender perlu menggunakan pendekatan (lingkungan yang mendukung), mengenali berbagai faktor yang membentuk norma gender dan peran yang muncul kemudian dalam kehidupan kita. Tingkatan yang saling terkait di lingkungan sekitar, yang mempengaruhi perkembangan individu: sistem budaya dan kepercayaan, konteks sosial dan konteks struktural di mana orang berpartisipasi secara aktif dan lingkungan terdekat. Dalam mencapai perubahan melalui suatu sistem (lingkungan yang mendukung), mulai dari membawa perubahan ideologi (ideological framework) melalui perubahan institusi dan kebijakan, hingga mencapai dan mencerminkan dalam praktik dan praktik internal (praktik intelektual).

Pendekatan lingkungan yang mendukung bertujuan untuk mengubah norma sosial yang berbahaya – termasuk praktik berbasis gender atau ketidaksetaraan gender struktural – yaitu, penyebab utama ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Banyak strategi untuk mengubah norma dan kepercayaan sosial diimplementasikan dalam sistem struktur yang sama yang mendukung atau membenarkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Perubahan dicapai melalui perubahan struktural, dengan menggunakan langkah-langkah seperti komunikasi berskala besar dan kampanye pemasaran, perencanaan dan rekonstruksi sosial, perubahan legislatif, pembentukan kembali penyampaian layanan, peraturan, undang-undang atau tindakan keuangan.¹¹⁸

5.2 Hambatan di Bidang Ekonomi^{119 120}

Menurut laporan tahunan Indeks Kesenjangan Global atau the Global Gap Index annual reports, kawasan Arab menduduki peringkat terendah dalam hal

¹¹⁸ UN Women Egypt, *Gender-Transformative Parenting Manual*, diakses pada 11 November 2022 <https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/06/gender-transformative-parenting-manual>

¹¹⁹ Shereen El Feki, Gary Barker dan Brian Heilman. 2017, *Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) - Middle East and North Africa*, (Cairo dan Washington, D.C.: UN Women dan Promundo-US.). Hal. 14 - 89

¹²⁰ World Economic Forum, *Economy Profiles - Global Gender Gap Report 2017, 2018, 2020, 2021*, diakses pada 27 Februari 2022 dan 15 November 2022 <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/in-full/economy-profiles-5b89d90ea5>

partisipasi politik dan ekonomi perempuan. Kawasan MENA menempati peringkat terakhir secara global dalam hal kesenjangan gender pada tahun 2017, hanya menutup 60% dari keseimbangan gender. Kawasan ini juga ditandai oleh kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kekuasaan, pengaruh, dan akses ke kontrol atas sumber daya. Daerah ini sebagian besar tertinggal dalam sub-indeks pemberdayaan politik di mana ia menutup kurang dari 9% dari keseimbangan gender. Rata-rata skor kesenjangan gender di kawasan MENA adalah 0,61; dengan perkiraan 157 tahun diperlukan untuk menutup kesenjangan gendernya.

Ketidakpastian ekonomi dan rendahnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja membuat laki-laki menghadapi tekanan besar untuk menjadi pemberi nafkah. Hampir 80 persen pria adalah pencari nafkah utama bagi keluarganya. Lebih dari separuh pria dilaporkan sering merasa stres karena kurangnya pekerjaan, dan khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Lebih dari 60 persen responden pria antara lain mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga.

Hambatan yang dihadapi dalam hal ekonomi yaitu, kawasan MENA yang memiliki tingkat partisipasi ekonomi perempuan yang paling rendah di dunia. Mengingat ketidakstabilan ekonomi di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir, dan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan kaum muda (mereka yang berusia 15 hingga 25 tahun), tidak mengherankan jika tiga perempat atau lebih pria di empat negara, dan perempuan dengan tingkat yang hampir sama, mendukung prioritas akses laki-laki ke pekerjaan di atas perempuan. Perempuan masih didefinisikan secara luas – baik oleh laki-laki maupun perempuan – sebagai istri dan ibu pertama, bukan oleh prestasi profesional atau tempat kerja.

Faktor ekonomi, kurangnya sumber daya ekonomi umumnya membuat perempuan, sangat rentan terhadap kekerasan. Ini menciptakan pola kekerasan dan kemiskinan yang menjadi melanggengkan diri, sehingga sangat sulit bagi para korban untuk melepaskan diri. Ketika pengangguran dan kemiskinan mempengaruhi laki-laki, ini juga dapat menyebabkan mereka menegaskan maskulinitas mereka melalui cara-cara kekerasan. Pada tahun 2020, Mesir berada

di peringkat ke-134 dari 153 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global. Ini peringkat ke-140 dari 153 negara dalam partisipasi dan peluang ekonomi perempuan. Hanya 18% perempuan usia kerja yang berpartisipasi dalam perekonomian, dibandingkan dengan 65% pria.

Perbandingan angka partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki tahun 2017 sampai 2021; tahun 2017 24,89% perempuan dan 80,40% dengan jarak antara perempuan dan laki-laki sebesar -55.51. 2018 perempuan 24,10% dan laki-laki 77,70% dengan jarak antara perempuan dan laki-laki sebesar -53.60%. Tahun 2020 perempuan 24,70% dan laki-laki 77,00% dengan jarak antara perempuan dan laki-laki sebesar -52.30% . Tahun 2021 perempuan 20,00% dan laki-laki 75,19% dengan jarak antara perempuan dan laki-laki sebesar -55.19%.

Dari data Global Gender Gap Index baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja di Mesir. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Maka pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan perlu di perkuat agar dapat bekerja dan mencari nafkahnya sendiri dengan tidak bergantung pada laki-laki, bukan hanya akan menguntungkan perempuan itu sendiri tetapi juga dapat menguntungkan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran di Mesir.

5.3 Hambatan di Bidang Politik

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kemauan politik untuk membawa reformasi luas ke sistem peradilan serta untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik. Hal ini mengapa penting melihat bahwa perlu adanya perempuan dalam pembuat kebijakan di masyarakat, diharapkan dengan adanya perempuan dapat menjembatani isu-isu mengenai perempuan.

Perempuan Mesir memperoleh hak pilih untuk pertama kalinya pada tahun 1956, menjadikan mereka yang pertama di wilayah Arab yang memperoleh hak tersebut. Meski menjadi pionir awal partisipasi politik perempuan, dalam indeks yang relevan Mesir berada di peringkat bawah dibandingkan negara lain di dunia.

Berkenaan dengan keterwakilan perempuan di tingkat nasional (yaitu di parlemen). Sistem kuota diperkenalkan pada tahun 1979 dan kemudian dibatalkan, yang mengakibatkan penurunan tajam keterwakilan perempuan. Sistem kuota yang dimodifikasi diadopsi sebelum tahun 2011, kemudian dihapuskan di bawah UUD 2012, mengakibatkan penurunan tajam lainnya dalam keterwakilan perempuan di parlemen.¹²¹

Dalam perwakilan politik, terutama di pemilihan parlemen pada November tahun 2010 menghasilkan jumlah perempuan tertinggi sekitar 13 persen, tetapi parlemen kurang memiliki legitimasi di mata rakyat Mesir, yang melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Mubarak. Pemilihan umum di tahun berikutnya tepatnya pada bulan November 2011, hanya membawa sembilan perempuan ke parlemen, lima dari blok Islam, selain itu, dua perempuan Coptic (Kristen) diangkat ke parlemen. Secara tradisional bidang politik dipandang sebagai pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki.

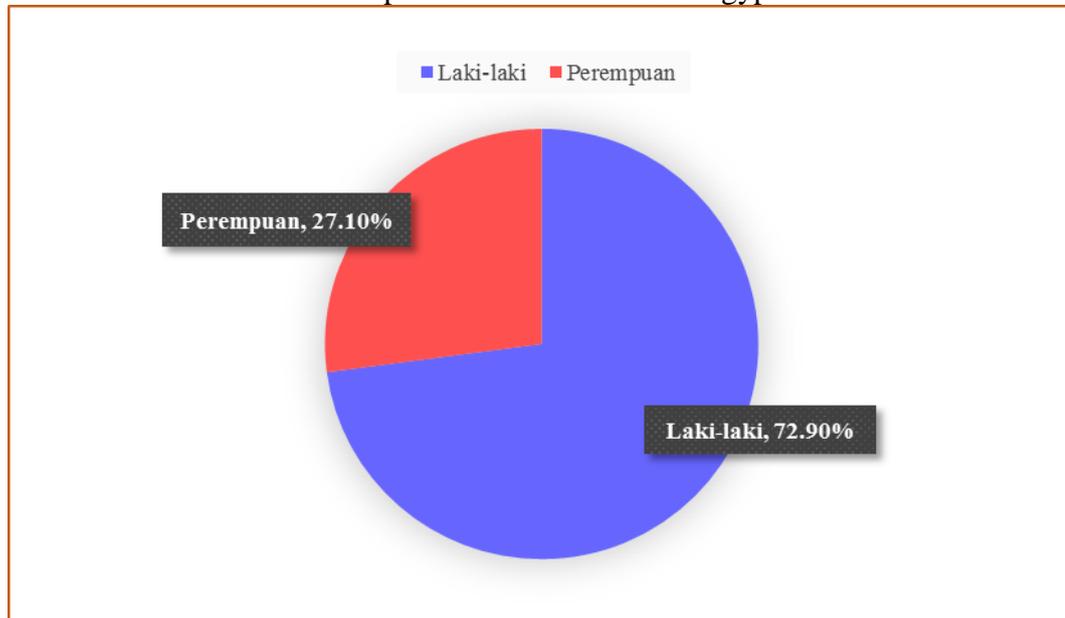
Di Mesir, perempuan mewakili setengah dari populasi. Namun, seperti di banyak masyarakat berkembang, mereka menghadapi sejumlah tantangan dalam kaitannya dengan pendidikan, perawatan kesehatan dan partisipasi, yang pada gilirannya berdampak pada kesadaran hak-hak mereka dan membatasi kapasitas dan kemampuan mereka. Sepanjang sejarah, perempuan di Mesir telah berjuang untuk mengambil bagian dalam dan berkontribusi pada kehidupan publik dan politik. Mereka mulai dengan mengklaim hak mereka atas pendidikan, yang sangat penting dalam membuka pintu menuju semua hak lainnya.

Sebagai hasil dari advokasi dan aktivisme aktif perempuan, mereka berhasil mendapatkan hak-hak substansial pada tingkat partisipasi dan keanggotaan dalam serikat pekerja dan hak untuk terlibat dalam partisipasi politik dan sosial. Pada tahun 2019, setelah Mesir menyaksikan perjuangan panjang untuk kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi dan sosial, parlemen Mesir menyetujui amandemen konstitusi yang mencakup kuota gender, menyediakan 25 persen kursi parlemen untuk perempuan. Dalam sejarah parlemen perempuan Mesir mencapai

¹²¹ National Council for Women. 2017, *National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030 Vision and Pillars*, Abdul Razzaq Al Sanhoury Street, hal. 25

persentase keterwakilan tertinggi pada tahun 2020, sejak memenangkan hak untuk memilih dan mencalonkan diri pada tahun 1956.¹²²

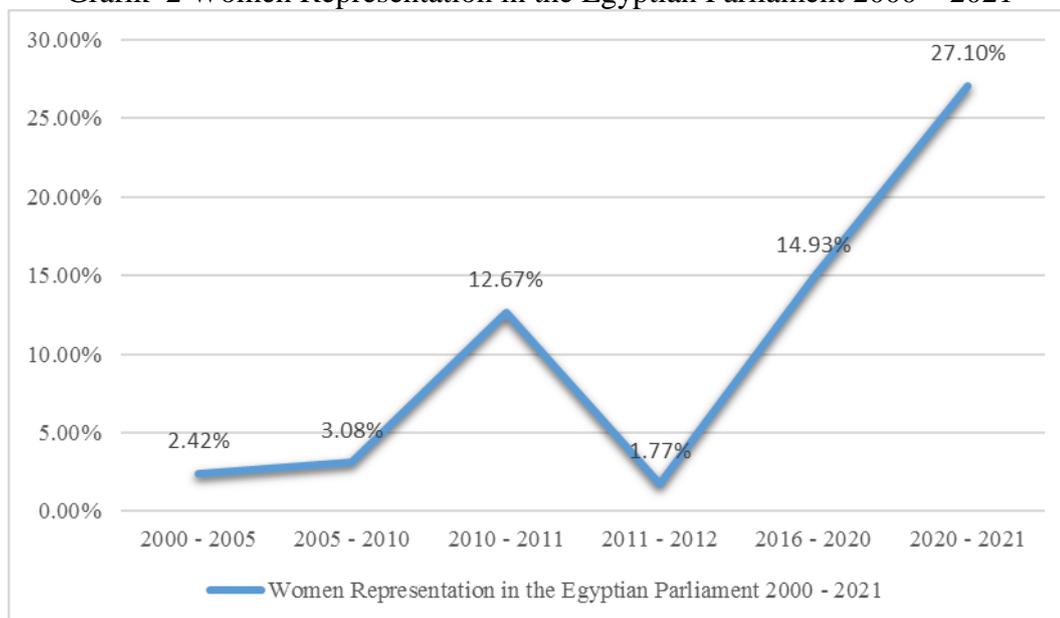
Grafik 1 Women Representation in 2020 the Egyptian Parliament



Sumber: REPRESENTWOMEN – Parity for Women in Politics – https://www.representwomen.org/gender_quota_helps_women_win_in_egypt

¹²² Fatma Tawfik, *Gender Quota Helps Women Win in Egypt*, diakses pada 15 Agustus 2022 https://www.representwomen.org/gender_quota_helps_women_win_in_egypt

Grafik 2 Women Representation in the Egyptian Parliament 2000 – 2021



Sumber: REPRESENTWOMEN – Parity for Women in Politics – <https://www.representwomen.org/gender-quota-helps-women-win-in-egypt>

Setelah pemilihan pada tahun 2020, anggota parlemen yang baru terpilih mengambil sumpah jabatan mereka pada 12 Januari 2021. Dalam masa jabatan parlemen baru (2021-2026), perempuan memenangkan 162 kursi dari 596 kursi, 142 anggota parlemen menang dari daerah pemilihan daftar partai, enam dari daerah pemilihan individu, dan 14 melalui penunjukan presiden. Dengan kombinasi keberhasilan perempuan pada siklus pemilihan ini dan penunjukan presiden, perempuan berhasil membentuk 27 persen dari Parlemen Mesir; Mesir kini menempati urutan ke-67 dunia untuk keterwakilan perempuan. Di tahun-tahun sebelum 2020, keterwakilan perempuan di parlemen Mesir tidak pernah melebihi 15 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, keterwakilan perempuan bahkan turun di bawah dua persen kursi di parlemen.¹²³ Diharapkan dengan lebih banyaknya keterwakilan perempuan di bidang politik dapat menciptakan kemajuan yang lebih baik dalam pemerintahan Mesir.

¹²³ Fatma Tawfik, *Gender Quota Helps Women Win in Egypt*, diakses pada 15 Agustus 2022 <https://www.representwomen.org/gender-quota-helps-women-win-in-egypt>

Hal ini sejalan dengan harapan UN Women Mesir terhadap perubahan kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik Mesri yang dapat memberikan kesempatan untuk lebih mempromosikan pembuatan kebijakan legislasi yang responsif gender yang sejalan dengan komitmen internasional Mesir tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk representasi perempuan yang lebih besar dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkatan. Ini termasuk dukungan berkelanjutan kepada kandidat perempuan untuk pemilihan dewan lokal, di mana kuota 25% untuk perempuan membuka ruang bagi partisipasi setidaknya 13.500 anggota dewan lokal perempuan di seluruh Mesir.¹²⁴

Status perempuan dalam masyarakat mana pun merupakan hasil interaksi antara faktor budaya, sosial dan ekonomi, yang semuanya bersinggungan secara kompleks. Akumulasi budaya seringkali memiliki dampak yang menentukan pada hasutan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, struktur komunitas memengaruhi pendidikan, pengasuhan, hubungan keluarga, dan dinamika sosial. Ada juga banyak kendala hukum yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak-haknya secara penuh.¹²⁵

¹²⁴ UN WOMEN Egypt, *Leadership and political participation*, diakses pada 15 Februari 2023, <https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation-4>

¹²⁵ National Council for Women. 2017, *National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030 Vision and Pillars*, Abdul Razzaq Al Sanhoury Street, hal. 7